

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menuntut Indonesia untuk ikut serta dalam melakukan pembangunan. Dengan adanya pembangunan akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Salah satu ilmu pengetahuan yang berperan dalam kegiatan perekonomian adalah akuntansi. Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh perusahaan maupun badan usaha lainnya, yang mempunyai fungsi untuk menilai dan menentukan posisi keuangan suatu perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatan operasional suatu perusahaan sangat memerlukan sistem akuntansi, khususnya dalam menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen maupun berbagai pihak di luar perusahaan yang membutuhkannya. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan Mulyadi (2001: 3).

Informasi memang sangat penting dan menjadi salah satu unsur penentu dalam hal pengambilan keputusan. Selain itu, suatu perusahaan memerlukan sebuah sistem dan prosedur. Tanpa sistem dan prosedur suatu perusahaan tidak dapat merencanakan dan mengawasi aktivitas yang kompleks.

Menurut Mulyadi (2010), Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan, prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pengelolaan negara telah menyebabkan terjadinya peningkatan kegiatan pengadaan barang dan jasa di perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Pengadaan barang dan jasa pada perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Daerah) merupakan aktivitas yang penting dalam mendorong mewujudkan pembangunan. Pengadaan barang dan jasa menyita perhatian masyarakat dan pemerintah mengingat resiko yang mungkin ditimbulkan berupa kecurangan (*fraud*) maupun kesalahan (*error*). Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan menunjukkan adanya kepentingan pribadi seseorang. Sedangkan, kesalahan (*error*) adalah tindakan yang dilakukan tidak sengaja diluar kendali seseorang sehingga tidak ada indikasi kepentingan pribadi jika seseorang melakukan kesalahan tersebut.

Pada saat ini praktek akuntansi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara tentu sudah diatur berdasarkan peraturan menteri negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) nomor 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMN, pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBD.

Selain itu, pada perusahaan BUMN tempat saya melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yakni PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk WITEL D.I. Yogyakarta mempunyai sistem pengendalian yang baik di setiap bagian, salah satunya pengendalian yang ada pada bagian keuangan. Pegawai pada bagian keuangan mempunyai tugas dan wewenang masing-masing dalam memproses dokumen pembayaran (termasuk dokumen pengadaan) yang diterima dari *user*. Bagian *finance* dibagi menjadi 2 bagian yaitu bagian verifikasi dan bagian *cash/bank*. Bagian verifikasi adalah bagian yang memproses dokumen pembayaran yang diterima dari user sampai dengan pembuatan Surat Perintah Bayar (SPB). Sementara, bagian *cash/bank* adalah bagian yang melakukan pemosting akhir dan melakukan pembayaran. Pemrosesan dokumen pada bagian *finance* di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk telah menggunakan sistem *finest* dan SAP. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mulyadi (2008 : 164), bahwa ada empat unsur-unsur pokok dalam sistem pengendalian intern yaitu: (1) adanya pemisahan fungsi yang tegas, (2) sistem otorisasi, (3) praktik yang sehat dan (4) karyawan yang cakap. Dengan adanya sistem pengendalian intern diharapkan penyelewengan maupun penyalahgunaan kekayaan perusahaan dapat dihindari.

Pada perkembangannya PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk juga telah banyak melakukan inovasi-inovasi dengan memberikan produk layanan telekomunikasi. Dalam pelaksanaan verifikasi dokumen pengadaan dapat dilakukan dengan menggunakan tata cara yang sesuai. Tata cara untuk memverifikasi dokumen pembayaran ini dapat dilakukan 2 cara, yaitu verifikasi

kebenaran material dan verifikasi formal. Verifikasi kebenaran material ini menjadi tanggung jawab unit Logistik atau user yang melakukan kegiatan/pekerjaan yang menimbulkan kewajiban pembayaran. Verifikasi formal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Pelaksanaan verifikasi dokumen yang selama ini diterapkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sudah baik. Hanya saja terdapat sedikit kelemahan yang terjadi pada perusahaan ini berkaitan dengan verifikasi dokumen yaitu kurang lengkapnya berkas tagihan, ketidak sesuaian antara kontrak dengan berkas tagihan (rekening bank, jaminan bank, nilai kontrak), dan kesalahan penulisan (angka kuitansi dengan terbilang). Apabila kelemahan tersebut tidak segera di evaluasi tentunya akan berpotensi dalam pencatatan akuntansi yang terjadi tidak akurat dan akan memperlambat pencairan dana. Sistem dan prosedur verifikasi dokumen pengadaan yang memadai sangat dibutuhkan agar dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi kelemahan tersebut dan memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap pengelolaan keuangan, agar nantinya perusahaan dapat menjalankan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas dengan efektif.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan menyusun Tugas Akhir dengan judul “**Sistem Dan Prosedur Verifikasi Dokumen Pengadaan Pada Unit *Finance* PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk WITEL D.I Yogyakarta**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem dan prosedur verifikasi dokumen pengadaan pada unit *finance* PT. Telekomunikasi Indonesia WITEL D.I Yogyakarta?
2. Apakah pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan pada unit *finance* sudah sesuai dengan ketentuan keputusan direktur keuangan perusahaan perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor: KUG 02.02/r.01/HK230/2010 Tanggal 31 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kas?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengadaan barang dan jasa pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk WITEL D.I Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui prosedur verifikasi dokumen pengadaan barang dan jasa pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk WITEL D.I Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur verifikasi dokumen pengadaan barang dan jasa pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk WITEL D.I Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan Keputusan Direktur Keuangan Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor: KUG 02.02/r.01/HK230/2010 Tanggal 31 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kas.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang akan diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan membantu sebagai bahan referensi serta menambah wawasan tentang sistem dan prosedur verifikasi dokumen pengadaan barang dan jasa.
- b. Sebagai salah satu penerapan teori ilmu yang diperoleh semasa di bangku perkuliahan dan untuk mengetahui gambaran secara nyata sistem dan prosedur verifikasi dokumen pengadaan barang dan jasa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau rekomendasi terhadap pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pada perusahaan.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai **“Sistem Dan Prosedur Verifikasi Dokumen Pengadaan Pada Unit *Finance* PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk WITEL D.I Yogyakarta”**.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif pada suatu perusahaan BUMN, bertujuan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang mendalam mengenai pertanyaan penelitian yang diangkat. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara Sistem dan Prosedur dengan kondisi riil yang ada di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil objek PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk WITEL D.I Yogyakarta, Jalan Yos Sudarso No. 9 Kota Baru, Yogyakarta.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung dan wawancara dengan pimpinan atau pihak yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta sistem pengendalian intern dalam prosedur pengadaan barang dan jasa. Data primer meliputi hasil observasi, hasil wawancara, gambaran prosedur pengadaan barang dan jasa, dan studi kasus di lapangan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang mendukung data primer, yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah:

1. Metode observasi adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mengamati langsung kedalam kegiatan operasional mulai dari penerimaan dokumen sampai dengan pembuatan Surat Perintah Bayar (SPB).
2. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dan informasi melalui proses tanya jawab secara langsung dengan pegawai bagian verifikasi yang berkaitan langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.
3. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan mempelajari catatan-catatan serta dokumen yang berhubungan dengan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa.
4. Metode studi kasus di lapangan adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mengamati langsung di tempat kejadian, selama proses pengadaan berlangsung.
5. Studi pustaka adalah kegiatan pengumpuln data dengan cara membaca dan mempelajari buku atau referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang berhasil dikumpulkan, dengan uji non statistik sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif.

Pada analisis ini dilakukan perbandingan apakah pelaksanaan sistem dan prosedur verifikasi dokumen pengadaan pada bagian *finance* sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Keuangan Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor: KUG 02.02/r.01/HK230/2010 Tanggal 31 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kas atau masih perlu dilakukan perbaikan.

Pelaksanaan verifikasi dokumen pengadaan barang dan atau jasa harus adanya dokumen-dokumen pembayaran yang akan dianggap sah. Dan dokumen tersebut memiliki kriteria-kriteria khusus untuk memenuhi pelaksanaan verifikasi yang sesuai. Kriteria tersebut adalah terpenuhinya kelengkapan dokumen pembayaran dan adanya kwitansi tagihan. Hanya saja terdapat sedikit kelemahan yang terjadi pada perusahaan ini berkaitan dengan verifikasi dokumen yaitu kurang lengkapnya berkas tagihan, ketidak sesuaian antara kontrak dengan berkas tagihan (rekening bank, jaminan bank, nilai kontrak), dan kesalahan penulisan (angka kuitansi dengan terbilang).

Ada beberapa tahap dalam proses analisis data, yaitu:

1. Mengidentifikasi sistem yang digunakan.
2. Mengidentifikasi prosedur verifikasi dokumen pengadaan barang dan jasa.
3. Melakukan interpretasi hasil penelitian.
4. Menarik kesimpulan terhadap pertanyaan atau masalah penelitian kemudian memberikan saran sebagai pengembangan hasil penelitian.